



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telepon 21575 / Fax. 21575 Kode Pos 36513
Website: www.disnaker.tanjabbar.go.id Email: disnaker.tanjabbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEDY ARDIANSYAH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Juni 2026

Pihak Kedua,

Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag

Pihak Pertama,

DEDY ARDIANSYAH, SE., MM

Pembina TK. I(IV/b)

NIP. 19771230 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.	Persentase tenaga kerja yang dilatih	89%
		2.	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	65%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	86%
		2.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85
		2.	Nilai Evaluasi AKIP	83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.489.900.000,-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	24.272.000,-
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	3.562.000,-
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	20.710.000,-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.495.927.239,-
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.353.487.239,-
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	142.440.000,-
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	6.800.000,-
	• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	6.800.000,-
	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	470.629.200,-
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	14.396.900,-
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	67.568.100,-
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	44.075.000,-
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	28.390.000,-
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	8.400.000,-
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	7.800.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	796.312.000,-
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	5.000.000,-
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	91.200.000,-
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	700.112.000,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Rp.	55.960.000,-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	13.750.000,-	
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	2.000.000,-	
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	40.210.000,-	
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	140.604.100,-	
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Rp.	140.604.100,-
• Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.	140.604.100,-	
3. Program Hubungan Industrial	Rp.	818.701.000,-	
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	12.301.000,-
• Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp.	12.301.000,-	
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	806.400.000,-
• Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp.	806.400.000,-	
TOTAL		Rp.	5.809.205.539,-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DEDY ARDIANSYAH, SE, MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771230 200212 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Tepat Waktu - 12 Dokumen
2.	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Bulanan dan Tahunan)	- Ketetapan waktu penyampaian - Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	- Tepat Waktu - 100%
3.	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LkjiP/LAKIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi P emerintah	- Tepat Waktu - 1 Dokumen
4.	Penyampaian Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi dan IKU	- Ketetapan waktu penyampaian - Nilai AKIP OPD	- Tepat Waktu - 82,68 (A)
5.	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketetapan waktu penyampaian - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Tepat Waktu - B
6.	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Tepat Waktu - 1 Dokumen
7.	Menyampaikan Bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	- Tepat Waktu - 1 Dokumen
8.	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Tepat Waktu - 1 Laporan
9.	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketetapan waktu penyampaian - Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Tepat Waktu - 100%
10.	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan Inspektorat Kabupaten yang dapat diselesaikan setelah penertiban laporan	- Tepat Waktu - 2 Laporan
11.	Melaporkan Rencana Aksi pelaksanaan kegiatan sesuai MCP KPK (Perangkat daerah terkait)	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah dokumen kepatuhan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi MCP KPK	- Tepat Waktu - 1 Dokumen

12.	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketetapan waktu penyampaian - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	- Tepat Waktu - 12 Laporan
-----	---	--	---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



DEDY ARDIANSYAH, SE, MM

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19771230 200212 1 007